

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI, TRANSPARANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP FRAUD DI PEMERINTAHAN KABUPATEN PEMALANG

Syarif Hidayatullah¹, Muhamad Yusuf², M. Fithrayudi Triatmaja³

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Syarif.hidayatullah11323@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap fraud di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Jumlah sampel 85 responden dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud di pemerintahan Kabupaten Pemalang, variabel kompensasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap fraud di pemerintahan Kabupaten Pemalang dan variabel transparansi berpengaruh negatif terhadap fraud di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Secara simultan, gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap fraud di pemerintahan Kabupaten Pemalang.

Kata Kunci: *Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, Fraud di Pemerintahan Kabupaten Pemalang.*

The Influence of Leadership Style, Compensation, Transparency and Internal Control System on Fraud in Pemalang District Government

Syarif Hidayatullah¹, Muhamad Yusuf², M. Fithrayudi Triatmaja³

¹Undergraduate Program in Accounting Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Syarif.hidayatullah11323@gmail.com

Abstrak

This study aims to determine the influence of leadership style, compensation, transparency and internal control system on Fraud in Pemalang District Government. The population was all civil servants (ASN) who are in charge of Local Government Agency (OPD) in Pemalang District Government. The purpose sampling technique has been applied to take 85 respondents. Moreover, survey and distributing questionnaires has been conducted as a collecting data technique. Meanwhile, the analysis used in this study was multiple linear analysis using SPSS 20. The result showed the hypothesis test result stated partially, the leadership style has no significant effect on Fraud in Pemalang District Government. Otherwise, compensation and internal control systems have positively affected it and transparency has negatively affected it. Simultaneously, all variables have significantly affected on Fraud in Pemalang District Government.

Keywords: leadership style, compensation, transparency and internal control system, Pemalang District Government.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah mempunyai peran penting dalam membangun dan memajukan daerah baik dari segi infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan memberantas kemiskinan sehingga masyarakatnya berada dalam kemakmuran, bahkan hal ini sudah menjadi urusan bagi Pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat, sesuai dengan Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 14.

Kemajuan ekonomi yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat seringkali mempunyai tantangan, dan salah satu tantangan yang muncul adalah perilaku menyimpang atau penipuan. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kolektif dalam suatu lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bahkan berpotensi merugikan keuangan negara.

Pada umumnya, penipuan ini terwujud dalam bentuk penipuan yang disengaja, seperti pemalsuan, penjiplakan, atau pencurian, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Naibaho (2019). Para pelaku kecurangan umumnya adalah individu-individu yang bekerja di dalam organisasi tempat kecurangan tersebut terjadi. Hasil penelitian ACFE Indonesia tahun 2019 mencatat kerugian total akibat kecurangan mencapai Rp. 873.430.000.000 dengan 239 kasus kecurangan tercatat. Instansi pemerintahan seringkali menjadi tempat kejadian kecurangan karena kerangka kepengurusan yang rumit, birokrasi nya rumit, kondisi dengan integritas terbatas, kekurangan kontrol yang efektif, dan tekanan yang tinggi. Oleh karena itu, banyak pelaku kecurangan yang terlibat dalam tindakan ini (Usman, 2017).

Masih banyak kepala daerah yang melakukan tindakan fraud, hal ini disebabkan karena mental serakah dan haus akan kekuasaan. Menurut Albrecht et al. (2015) salah satu faktor yang menyebabkan terealisasi nya fraud adalah kekuasaan. Kekuasaan dicorakkan oleh strategi pemimpin seseorang ketika memandu instansinya. Seyogyanya seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi pegawainya dalam memberantas tindak kecurangan. Namun sebaliknya, kondisi saat ini justru banyak pemimpin yang mempelopori tindakan kecurangan.

Dalam banyak situasi, tindakan kecurangan tidak hanya dipicu oleh motivasi pribadi dari pelaku, tetapi juga oleh kelemahan seorang pemimpin. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang secara signifikan berkontribusi pada terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah kecurangan, penting untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang tepat. Gaya kepemimpinan menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan fraud dalam sebuah organisasi (Ghani et al. 2021). Ketika sebuah organisasi memiliki kepemimpinan yang efektif, anggotanya cenderung

untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Gaya kepemimpinan dikatakan efektif apabila seorang pemimpin dapat memotivasi pegawainya. Baik berupa penugasan yang tepat, jenjang karir, insentif, atau pengakuan atas kinerja yang baik (Tyagita, 2020).

Kasus suap dalam proses perekrutan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang mencerminkan bahwa beberapa pejabat atau staf mungkin tidak terpuaskan oleh tingkat kompensasi yang diperoleh. Para pejabat kemudian memilih untuk memberikan suap dengan harapan mendapatkan jabatan yang diinginkan dan kompensasi yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kompensasi memiliki dampak pada insiden kecurangan di sektor pemerintahan. Ketika kompensasi yang diberikan cukup dapat meningkatkan kepuasan untuk motivasi pegawai, yang pada gilirannya diharapkan dapat memperbaiki kinerja mereka dan meminimalisir potensi tindakan kecurangan. Studi yang dilakukan oleh Agus & Rina (2021) menunjukkan bahwa kompensasi berkontribusi negatif terhadap kecenderungan melakukan kecurangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Helmayunita (2019) mengindikasikan bahwa kesesuaian tingkat kompensasi dapat memiliki dampak positif pada kecenderungan untuk melakukan kecurangan.

Selain itu, upaya pencegahan terjadinya kecurangan dapat dioptimalkan melalui prinsip keterbukaan dan kejujuran. Transparansi menjadi salah satu faktor terjadinya fraud, karena tanpa adanya transparansi seorang oknum akan sangat mudah menyalahgunakan anggaran. Namun, dengan adanya transparansi dalam proses pelaksanaan aktivitas anggaran sehingga masyarakat dapat mengawal pelaksanaan anggaran sehingga meminimalisir adanya kecurangan. Melalui transparansi tindakan fraud dapat dicegah dan berkurang karena adanya proses keterbukaan dan kejujuran yang membuat publik lebih percaya yang menjelaskan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap fraud (Dewi, 2020).

Dalam usaha untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan (fraud), langkah penting adalah melakukan perbaikan pada pengawasan dari internal. Hal ini dikarenakan pengendalian internal memiliki peran krusial sebagai kebijakan dan prosedur dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan kebijakan pemerintah. Menurut definisi COSO yang dikutip dalam Sawyer (2006), Sistem pengendalian internal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pimpinan, manajemen, dan anggota tim perusahaan untuk menanamkan keyakinan yang cukup dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan keunggulan operasional, keakuratan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait. Studi yang dilakukan oleh Anisya (2006) dan Sumbayak (2017) juga menegaskan bahwa sistem pengendalian internal memberikan pengaruh besar terhadap tingkat penipuan.

Penelitian ini menggunakan teori Fraud Diamond sebagai kerangka kerja, yang mencakup faktor-faktor tekanan, kesempatan, pembenaran, dan kemampuan sebagai penyebab terjadinya kecurangan. Dalam penelitian ini, tekanan (pressure) digambarkan sebagai kepuasan terhadap kompensasi, kesempatan (opportunity) sebagai sistem pengendalian internal, pembenaran (rationalization) sebagai transparansi, dan kemampuan (capability) sebagai gaya kepemimpinan.

Tekanan (pressure) adalah situasi atau dorongan yang memotivasi orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menipu. Dalam konteks penelitian ini, tingkat kepuasan terhadap kompensasi digunakan sebagai indikator dari tekanan yang bisa mempengaruhi perilaku.

Kesempatan (opportunity) merujuk pada kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan. Ini sering kali timbul karena kerentanan dalam struktur pengendalian internal organisasi, pengawasan yang tidak memadai, dan penyimpangan kekuasaan. Dalam penelitian ini, konsep kesempatan dijelaskan melalui evaluasi sistem pengendalian internal. Apabila sistem pengendalian internal nya baik dapat mengurangi peluang terjadinya fraud.

Pembenaran (rationalization) adalah cara individu membenarkan tindakan curang mereka secara moral. Dalam konteks penelitian ini, pembenaran terkait dengan transparansi, yang berarti bahwa organisasi harus transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat umum.

Kemampuan (capability) mencakup keterampilan dan kapasitas individu untuk melaksanakan tindakan kecurangan. Dalam penelitian ini, aspek kemampuan diidentifikasi melalui gaya kepemimpinan.

Oleh karena itu, penelitian ini menghubungkan faktor-faktor ini dengan kemungkinan terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan, dan hasilnya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perbaikan dalam sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, kompensasi, dan transparansi dapat membantu mengurangi risiko kecurangan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berkeinginan meneliti mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap fraud di pemerintahan Kabupaten Pematang Jaya.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori diungkap dari Fritz Heider untuk memeriksa seperti apa individu mendefinisikan peristiwa, sebab, atau alasan di balik tindakan mereka. Perilaku ini dipahami sebagai hasil dari kombinasi faktor dari dalam dan luar. Ketika orang menilai orang lain, persepsi mereka dipengaruhi oleh teori atribusi. Pandangan serupa ditegaskan oleh Robbins & Stephen (2003), yang menjelaskan teori atribusi sebagai cara

orang menilai orang lain berdasarkan makna tertentu dari perilaku tersebut. Pada dasarnya, teori ini mengindikasikan apakah suatu peristiwa yang dilakukan disebabkan oleh dirinya sendiri atau disebabkan oleh faktor lain.

Fraud Diamond Theory

Teori ini diperkenalkan oleh Wolfe & Hermanson (2004), bermakna perluasan dari Fraud Triangle. Teori ini memperkenalkan "capability" faktor tambahan dalam kasus kecurangan. Capability atau kompetensi merujuk pada kemampuan pegawai untuk melalaikan pengendalian internal, merancang strategi penggelapan, dan mengelola keadaan demi kepentingan pribadi mereka. Menurut Wolfe & Hermanson (2004), mereka meyakini apabila mayoritas penipuan mungkin terwujud jika individu memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan rincian kecurangan.

Menurut Manurung & Hadian (2013), penipuan dapat dijelaskan sebagai "setiap tindakan, kelalaian, atau penyembunyian dengan niat untuk mengecoh orang lain, khususnya dengan tujuan mengakibatkan kerugian, manipulasi, atau penyembunyian berdasarkan beberapa informasi penting dalam transaksi yang dilakukan dengan pengetahuan palsu mereka, atau dengan sengaja menyembunyikan kebenaran atau melakukan kesalahan untuk mengecoh orang lain sehingga merugikan mereka." Orang yang terlibat dalam penipuan umumnya memiliki sifat egois dan cenderung melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu melibatkan cara-cara yang tidak etis (Duffield & Grabosky, 2001).

Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor utama dalam mencapai terwujudnya sistem pemerintahan lebih baik. Pemimpin sangat menentukan bagaimana suatu organisasi pemerintahan daerah dijalankan. Pemimpin menjadi teladan bagaimana pegawai yang di bawahnya menjalankan pemerintahan. Jika pemerintahan dijalankan pemimpin yang tidak tepat, maka ini dapat menjadikan pemicu pegawai melakukan kecurangan dan pada akhirnya akan terbangun budaya pemerintahan dan birokrasi yang jauh dari nilai-nilai demokrasi (Rahmi, 2015).

Potret kepemimpinan nasional membutuhkan sosok figur pemimpin yang memiliki kapasitas yang mampu membangun dimensi pemerintahan secara komprehensif. Gaya Kepemimpinan adalah suatu faktor penting bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu cara yakni berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mengetahui keluhan, setelah itu mengambil suatu kebijakan. Dengan gaya kepemimpinan yang seperti itu sangat berguna untuk meningkatkan suatu daerah mengenali secara langsung tanpa khawatir salah informasi (Kurniawan, 2020).

Kompensasi

Dalam memberikan kompensasi kepada pegawai, instansi bertujuan untuk menciptakan pengaruh positif pada kinerja pegawai, yang mencakup:

- a) Meningkatkan kegigihan dan antusiasme kinerja pegawai.
- b) Menambah efektivitas dan pencapaian dalam pekerjaan pegawai.
- c) Menjadi faktor dorongan dalam bekerja bagi pegawai.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang - undang ini menetapkan gaji pokok serta berbagai tunjangan yang diterima oleh ASN (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Besaran gaji ASN berkaitan dengan jabatan atau golongan yang dipegang, di mana semakin tinggi jabatan ASN, semakin besar pula tunjangan yang diterima.

Selain gaji pokok, ASN juga mendapatkan berbagai jenis tunjangan, termasuk:

1. Tunjangan keluarga: Diberikan kepada ASN dengan keturunan yang berusia kurang dari 18 tahun.
2. Tunjangan suami atau istri: Diberikan kepada ASN yang sudah menikah atau memiliki pasangan hidup.
3. Tunjangan jabatan: Besar nya tergantung pada golongan atau jabatan yang dipegang oleh ASN.
4. Tunjangan tugas dinas: Diberikan saat ASN melakukan perjalanan dinas ke berbagai tempat, yang sering disebut sebagai SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
5. Tunjangan daya kerja: Besar nya bervariasi berdasarkan kinerja individu ASN, dan dapat berbeda dari suatu daerah dengan daerah lainnya.
6. Tunjangan makan: Diberikan disesuaikan dengan kaidah yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Semua tunjangan ini dibuat untuk memberikan penghargaan kepada ASN, mendorong kinerja yang lebih baik, dan memastikan bahwa kompensasi mereka mencukupi untuk kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Besaran dan syarat-syarat tunjangan ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di masing-masing instansi pemerintah daerah.

Transparansi

Transparansi merupakan kejujuran dan keterbukaan, akuntabilitas yang dibangun. Secara luas mempertimbangkan dua landasan fundamental tata kelola organisasi yang efektif. Transparansi menyiratkan bahwa semua tindakan organisasi harus dilakukan secara cermat agar dapat diawasi oleh publik. Transparansi merupakan asas yang menjamin akses keterbukaan bagi semua masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang terselenggaranya program kerja pemerintah, khususnya informasi dalam pembuatan kebijakan dan realisasinya.

Sistem Pengendalian Internal

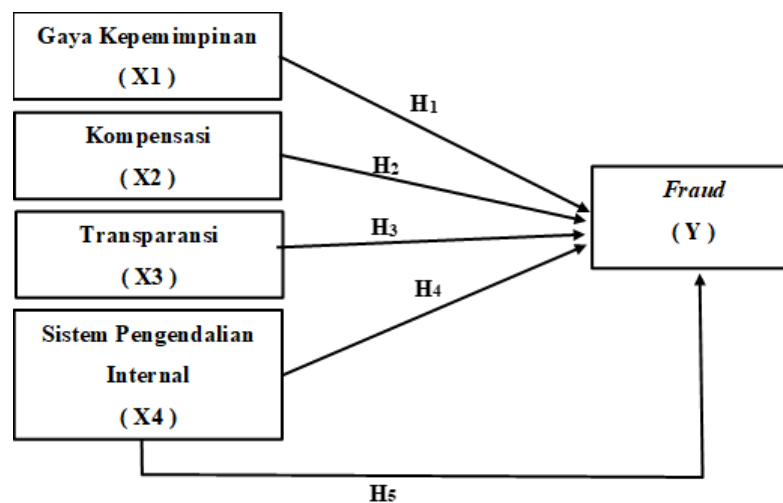
Menurut Jason Scott (2014:226), sistem pengendalian internal menyimbolkan suatu proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian telah tercapai. Sementara itu, menurut IAPI (2011), Sistem Pengendalian Internal adalah pengelolaan yang direncanakan oleh komite eksklusif dan pihak terkait dengan tujuan membangkitkan ketegasan yang cukup mengenai sistem pengendalian internal (IAPI: 319.2).

Fraud

Kecurangan, menurut Black Law Dictionary, adalah tindakan sengaja memanipulasi fakta atau informasi yang penting, yang dapat mempengaruhi orang lain untuk terlibat dalam tindakan curang atau menyebabkan kerugian bagi mereka. Penipuan biasanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi dalam beberapa situasi, terutama jika dilakukan secara sengaja, dapat dianggap sebagai kejahatan, dengan tindakan seperti penyajian yang salah, penutupan informasi penting, atau kegagalan untuk memberikan informasi yang benar, yang dapat mengarah pada tampilan yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Hal ini dapat merugikan pihak yang lainnya.

Kerangka Pemikiran

Dengan merujuk pada teori diatas dan hubungan antara gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi, serta sistem pengendalian internal dalam konteks kasus penipuan di pemerintahan Kabupaten Pematang Jaya, maka kita dapat merangkai kerangka pemikiran penelitian seperti ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Dengan merujuk pada kerangka pemikiran ini, hipotesisnya adalah seperti ini:

H1: Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*

H2: Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*

H3: Transparansi berpengaruh terhadap *Fraud*

H4: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *Fraud*

H5: Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metodologi kuantitatif. Dimana peneliti meneliti tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* di Pemerintahan Kabupaten Pemalang.

Waktu dan Tempat Penelitian

Studi ini dilaksanakan dengan lokasi Dinas di Kabupaten Pemalang dari tanggal 17 Mei sampai 31 Juli 2023.

Populasi dan Sampel Penelitian

Konstituen pada studi ini merupakan semua ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sampel pada studi ini hanya terbatas pada OPD yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidangnya masing-masing.

Pada studi ini, digunakan sistem pemilihan yang dikenal sebagai Purposive Sampling. Metode purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang mempertimbangkan kriteria khusus untuk memilih unit organisasi pemerintah daerah (OPD) yang akan menjadi bagian dari sampel studi.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini merujuk pada data primer. Sumber materi studi berasal atas pandangan subjek penelitian yang diperoleh melalui tanggapan responden, yakni para ASN yang bekerja di dinas Kabupaten Pemalang.

Proses penghimpunan informasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penggunaan formulir pertanyaan. Seluruh indikator variabel di studi ini diukur mengaplikasikan skala Likert. Skala Likert yaitu alat penilaian yang diaplikasikan dalam menilai sikap dan pandangan. Skala ini digunakan dalam pengisian kuesioner yang meminta responden untuk menilai sejumlah pernyataan. Semua pertanyaan dalam angket untuk setiap variabel menggunakan skala penilaian dari 1 hingga 5.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada studi ini dilakukan dengan menjalankan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 20. Dalam pengolahan data, berbagai uji statistik dijalankan, termasuk analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (termasuk uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji regresi linear berganda, serta uji hipotesis (termasuk uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Yang didapat dari uji statistik deskriptif setelah analisis adalah seperti ini:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Gaya Kepemimpinan	85	12	30	21.80	3.210
Kompensasi	85	17	50	38.87	6.170
Transparansi	85	11	30	23.56	3.797
Sistem Pengendalian Internal	85	5	25	12.81	4.521
Fraud	85	12	35	19.15	3.375
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Uji Kualitas Data

1) Hasil Uji Validitas

Merujuk pengujian uji validitas diperoleh nilai signifikansi $<0,05$, dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa semua item memiliki validitas yang baik.

2) Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Gaya Kepemimpinan	0,612
Kompensasi	0,866
Transparansi	0,832
Sistem Pengendalian Internal	0,859
<i>Fraud</i>	0,846

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Merujuk dari pengujian reliabilitas, diperoleh poin signifikansi $>0,60$, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner memiliki reliabel yang baik.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	2.82989590
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.804
Asymp. Sig. (2-tailed)		.537

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Merujuk dari pengujian normalitas di atas, diperoleh poin asymp. Sig. (2-tailed) sebanyak 0,537 dan melebihi poin signifikansi 0,05, Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa nilai residual pada studi ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.413	2.604		4.766	.000		
Gaya Kepemimpinan	.204	.127	.194	1.615	.110	.607	1.649
Kompensasi	.172	.077	.315	2.235	.028	.443	2.258
Transparansi	-.309	.116	-.347	-2.650	.010	.512	1.952
Sistem Pengendalian Internal	.223	.077	.299	2.906	.005	.829	1.207

a. Dependent Variable: Fraud

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Dari tabel di atas, terlihat jika nilai toleransi pada variabel gaya kepemimpinan yakni 0,607, pada variabel kompensasi yakni 0,443, pada variabel transparansi yakni 0,512, pada variabel sistem pengendalian internal adalah 0,829. Dari pengujian toleransi menggambarkan semua variabel X memiliki nilai lebih dari 0,10. Dalam pengujian yang dilakukan, VIF (Variance Inflation Factor) di variabel gaya kepemimpinan yakni 1,649, pada variabel kompensasi yakni 2,258, pada transparansi adalah 1,952, dan pada variabel

sistem pengendalian internal adalah 1,207. Hasil perhitungan VIF menggambarkan bahwasanya semua variabel X bernilai VIF kurang dari 10. Dengan hal ini, diartikan jika dalam penelitian ini tanpa terdapat masalah multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.552	1.708		.323	.747
1 Gaya Kepemimpinan	.055	.083	.092	.663	.509
Kompensasi	-.013	.051	-.043	-.262	.794
Transparansi	-.011	.076	-.022	-.142	.887
Sistem Pengendalian Internal	.085	.050	.202	1.690	.095

a. Dependent Variable: Abs_res

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Dari tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen melebihi 0,05, seperti gaya kepemimpinan dengan nilai 0,509, kompensasi dengan nilai 0,794, transparansi dengan nilai 0,887, dan sistem pengendalian internal dengan nilai 0,095. Hasil ini menggambarkan bahwa tidak ada kehadiran heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa regresi ini dapat digunakan efektif untuk meramalkan variabel kecurangan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi, dan sistem pengendalian internal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.413	2.604		4.766	.000
1 GK	.204	.127	.194	1.615	.110
KO	.172	.077	.315	2.235	.028
TR	-.309	.116	-.347	-2.650	.010
SPI	.223	.077	.299	2.906	.005

a. Dependent Variable: FR

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Merujuk dari data, bisa dianalisis model estimasi seperti ini:

$$FR = 12,413 + 0,204GK + 0,172KO - 0,309TR + 0,223SPI + e$$

Uji Hipotesis

1) Uji t

1) Hasil pengujian hipotesis 1 (H_1)

Melihat dari tabel, output pengujian variabel GK mendapatkan poin koefisien sebanyak 0,204 poin signifikansi 0,110. Poin signifikansi variabel GK tidak kurang dari 0,05 menjelaskan jika **H1 ditolak**

2) Hasil pengujian hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian variabel KO memperoleh poin koefisien sebanyak 0,172 dan poin signifikansi 0,028. Nilai signifikansi variabel KO tidak lebih dari 0,05 menjelaskan jika **H2 diterima**.

3) Hasil pengujian hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian variabel TR memperoleh poin koefisien sebanyak - 0,309 dan poin signifikansi 0,010. Nilai signifikansi variabel TR tidak lebih dari 0,05 menjelaskan jika **H3 diterima**.

4) Hasil pengujian hipotesis 4 (H_4)

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian variabel SPI memperoleh poin koefisien sebanyak 0,223 dan poin signifikansi 0,005. Nilai signifikansi variabel SPI tidak lebih dari 0,05 menyatakan jika **H4 diterima**.

2) Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	284.314	4	71.078	8.453	.000 ^b
	Residual	672.698	80	8.409		
	Total	957.012	84			

a. Dependent Variable: Fraud

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompensasi, Gaya Kepemimpinan, Transparansi

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Dari data yang tertera, dapat diperhatikan bahwa poin F hitung adalah 8,453 dan signifikansi sebanyak 0,000. Poin signifikansi lebih kecil dari 0,05, diartikan bahwa Hipotesis 5 (H_5) dapat diterima. Hal ini menggambarkan jika gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi, dan sistem pengendalian internal dengan satu kesatuan memiliki pengaruh pada tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pematang

3) Koefisien Determinasi

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.545 ^a	.297	.262	2.900

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompensasi, Gaya

Kepemimpinan, Transparansi

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Dilihat dari data tersebut, besarnya angka koefisien determinasi (R^2) adalah sebanyak 0,262 sama dengan 26,2%. Hasil ini menunjukkan jika sebanyak 26,2% fraud di pemerintahan Kabupaten Pemalang mampu diterangkan oleh variabel gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi dan sistem pengendalian internal. Sedangkan 73,8% dijelaskan dengan penyebab selain dari faktor pada studi ini seperti tindakan yang kurang pant, kompetensi pejabat, bad people (sifat buruk) dan kesadaran anti fraud dan lain-lain.

Pembahasan

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap *Fraud*

Merujuk dari pengujian hipotesis secara parsial, bisa dilihat jika variabel gaya kepemimpinan memiliki koefisien sebanyak 0,204 dan signifikansi sebanyak 0,110. Poin signifikansi ini melebihi 0,05, yang menjelaskan jika gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan pada tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Dengan ini, hipotesis pertama (H_1) pada studi ini harus ditolak. Yang berarti baik atau buruknya gaya kepemimpinan di Kabupaten Pemalang tidak memiliki dampak signifikan pada kecenderungan terjadinya kecurangan. Perlu diperhatikan bahwa faktor-faktor lain mungkin berperan dalam mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Hasil ini konsisten dengan temuan dari Widhiani (2021), juga menyimpulkan jika gaya kepemimpinan tanpa memiliki pengaruh pada kecurangan. Studi ini juga konsisten dengan temuan oleh Indrapraja et al. (2021), Putra & Susanto (2020), Setiawan et al. (2019), dan Calsia (2019), menjabarkan jika gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan kecurangan

Pengaruh Kompensasi Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil analisis hipotesis secara terpisah, dapat diamati bahwa variabel kompensasi memiliki koefisien sebesar 0,172 dan signifikansi sebanyak 0,028. Poin

signifikansi ini tidak lebih tinggi dari 0,05, berarti kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Dengan ini, hipotesis ke dua (H_2) padastudi ini dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai di Pemerintahan Kabupaten Pemalang menerima kompensasi yang sesuai, termasuk gaji pokok, tunjangan, serta promosi atau kenaikan jabatan. Kompensasi yang memadai ini mendorong pegawai di Pemerintahan Kabupaten Pemalang untuk menghindari tindakan kecurangan, sehingga dapat mengurangi potensi tindakan kecurangan.

Temuan ini konsisten bersama hasil temuan yang dilakukan oleh Eriandani et al. dan Sunaryo (2019), dengan temuan kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya penipuan. Hasil ini pula mendukung temuan oleh Simanjuntak (2014), Pramudita (2013), dan Mustikasari (2013), juga mengkonfirmasi jika kompensasi memiliki dampak positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan.

Pengaruh Transparansi Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel transparansi memiliki nilai koefisien -0,309 dengan poin signifikansi sebanyak 0,010. Poin signifikansi tersebut kurang dari 0,05, hal ini membuktikan jika transparansi berpengaruh signifikan pada fraud di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini menyatakan hipotesis ketiga (H_3) pada studi ini diterima. Dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan transparansi dengan baik dengan mempermudah masyarakat dalam mengetahui dan mengawasi proses berjalannya anggaran sehingga tindak kecurangan akan semakin rendah.

Transparansi memungkinkan kita untuk mendeteksi fraud, atau bahkan mendeteksi penipuan (scams) yang dapat merugikan penipu dan orang lain serta masyarakat. Temuan ini sinkron dengan hasil temuan dari (Dewi, 2020) menjelaskan jika “tindakan fraud dapat dicegah dan berkurang karena adanya proses keterbukaan dan kejujuran”. Selain itu, temuan ini sesuai dengan temuan oleh Simanjuntak et al., (2020), Nursasi (2018), Miranda & Akmal (2019) dan Handayani (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap fraud.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil analisis hipotesis secara individu, terlihat bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki koefisien sebanyak 0,223 dan signifikansi sebanyak 0,005. Poin signifikansi kurang dari 0,05, mengindikasikan jika sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Dengan ini, hipotesis ke empat (H_4) pada studi ini dapat diterima. Temuan tersebut diatas menegaskan jika Pemerintahan Kabupaten Pemalang telah

berhasil mengaplikasikan sistem pengendalian internal dengan baik, dan berkontribusi pada Tindakan meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan (fraud).

Hasil studi ini konsisten dengan hasil studi oleh Anisya Yuliana (2016), yang juga menggambarkan jika sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Jelfi Saragih Sumbayak (2017), Aditya Amanda Pane (2018), Toisuta Novenia Natasya, et al. (2017), serta penelitian I Ketut Sujana & Putu Santi Putri Laksmi (2019), yang semuanya mengkonfirmasi bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Yuliana (2016) dan Jelfi Saragih Sumbayak (2017) juga mencatat bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap fraud.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan, variabel gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap fraud memiliki nilai koefisien 8,453 dengan poin signifikansi sebanyak 0,000. Poin itu kurang dari 0,05, sehingga dapat membuktikan jika gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi dan sistem pengendalian internal dalam satu kesatuan berpengaruh signifikan terhadap fraud di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Sehingga hipotesis ke lima (H_3) dalam penelitian ini diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk dari analisis data yang dilaksanakan, kesimpulan dalam studi ini adalah:

1. Dilihat dari individual, variabel gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Ini diperlihatkan oleh nilai signifikansi variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,110 pada uji hipotesis yang telah dilakukan. Sementara itu, variabel kompensasi dan variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang, dengan poin signifikansi variabel kompensasi sebanyak 0,028 dan variabel sistem pengendalian internal sebanyak 0,005. Selain itu, variabel transparansi secara individu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Ini dikuatkan oleh nilai koefisien -0,309 dan signifikansi sebesar 0,010 dalam uji hipotesis yang dilakukan.
2. Secara bersama-sama, variabel gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Hal ini didasarkan pada poin signifikansi sebanyak 0,000.

3. Angka koefisien determinasi (R^2) mencapai 26,2%, yang mengindikasikan bahwa sekitar 26,2% dari tindakan kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel seperti gaya kepemimpinan, kompensasi, transparansi, dan sistem pengendalian internal yang telah diteliti. Sementara itu, sekitar 73,8% sisanya diilustrasikan dengan penyebab lain selain dari faktor yang dimasukkan dalam studi ini, seperti perilaku tidak etis, kompetensi pejabat, sifat individu yang buruk, kesadaran anti-kecurangan, dan faktor-faktor lainnya.

Saran

Berpedoman pada hasil studi dan kesimpulan diatas, terdapat saran seperti:

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memasukkan variabel independen tambahan yang berhubungan dengan tindakan kecurangan. Hal ini akan memperluas pemahaman tentang penyebab yang dapat berpengaruh terhadap kecurangan, seperti tindakan tidak etis, kompetensi pejabat, karakteristik manusia yang negatif, kesadaran anti-kecurangan, dan faktor-faktor lainnya.
2. Studi yang dilakukan terbatas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat meluas ke badan atau kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pemalang. Hal ini akan memungkinkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dan memahami perbedaan situasi di berbagai bagian dari kabupaten tersebut.

Daftar Pustaka

- ACFE Indonesia. (2020). *Survey Fraud Indonesia*.
- Agus, I. G., & Rina, N. M. (2021). Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Albar, T., & Fitri, F. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, ETIKA ORGANISASI, KEADILAN KOMPENSASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP FRAUD (STUDI EMPIRIS PADA SKPD PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 527–537.
- Albrecht, C., Holland, D., Malagueño, R., Dolan, S., & Tzafrir, S. (2015). The Role of Power in Financial Statement Fraud Schemes. *Journal of Business Ethics*.
<https://doi.org/10.1007/s10551-013-2019-1>
- Anggara, M. R. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). *Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Anisya. (2006). *Faculty of economics, Riau University*. 1–13.
- Calsia, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan

- (fraud) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak berdasarkan Teori Fraud Triangle Analysis of factors affecting triangle fraud trends in health department of Pontianak City Based on the Triangle. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 67–83.
- Cropanzano, R., Bowen, D. E., & Gilliland, S. W. (2007). The Management of Organizational Justice. *Academy of Management Perspectives*. <https://doi.org/10.5465/AMP.2007.27895338>
- Dewi, P. M. O. (2020). *Pengaruh Moralitas Individu, Transparansi, Pengawasan, Efektifitas Internal Control Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan Kecurangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Duffield, G., & Grabosky, P. (2001). *The Psychology of Fraud*. Queensland Government. <https://www.aic.gov.au/>
- Faisal, M. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal AAJ*, 2(1).
- Febriani, F., & Suryandari, D. (2019). Implementasi Fraud Diamond Theory Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 33–46. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.33-46>
- Ghani, E. K., Mohamed, N., Tajudin, M. A., & Muhammad, K. (2021). The Effect of Leadership Style, Organizational Culture and Internal Control on Asset Misappropriation. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*.
- Handayani, R. H. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Potensi Kecurangan Penggunaan Dana Desa. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 19.
- Handoko, T. H. (2008). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*, (Edisi Kedua).
- Hayani, R. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)*. 1–141. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14092>
- Howe, M. A., & Malgwi, C. A. (2006). Playing the Ponies: A \$5 Million Embezzlement Case. *Journal of Education for Business*. http://www.us.kpmg.com/Rutus_Prod/Documents/9/Integritysurvey09_10
- Indrapraja, M. H. D., Agusti, R., & Mela, N. F. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Aparatur Sipil Negara. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 166–183. <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.166-183>
- Jackson, K. R., Holland, D. V., Albrecht, C., & Woolstenhulme, D. R. (2010). Fraud Isn't Just For Big Business: Understanding the Drivers, Consequences, and Prevention of Fraud in Small Business. *The Journal of International Management Studies*.
- Kassem, R., & Higson, A. (2012). The New Fraud Triangle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 3.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia,

- Kesesuaian Kompensasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(5), 530–539.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. Alqaprint Jatinangor.
- Lubis, R. A. (2016). *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan, dan Pengembangan Mutu Karyawan terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi RSUD Pirngadi Medan*.
- Manurung, D. T., & Hadian, N. (2013). Detection Fraud of Financial Statement with Fraud Triangle. *Proceedings of 23rd International Business Research Conference*.
- Megawati, M. H. (2018). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ETIS ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP FRAUD PADA UNIVERSITAS SWASTA DI BANDAR LAMPUNG*.
- Michael P. Todaro, S. C. S. (2004). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Mulyadi, & Puradiredja, K. (1998). *Auditing*. Salemba Empat.
- Mustika, D., Hastuti, S., & Hariningsih, S. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung*.
- Naibaho, Y. P. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Medan). *Jurnal UHN*.
- Noor, A. G. (2017). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMPENSASI TERHADAP FRAUD PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG*. 1–14.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*. 9(000541), 541–544.
- Permatasari, D. E., Nurrohman, T., & Kartika, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 37. <https://doi.org/10.35384/jkp.v14i1.71>
- Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 35–43.
- Putra, R. R., & Susanto, S. (2020). Pengaruh Employee Morality Dan Leadership Style Terhadap Accounting Fraud Tendencies Yang Dimoderasi Oleh Internal Control System. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 5(1), 28–42. <https://doi.org/10.52447/jam.v5i1.4173>
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organizational justice and employee fraud. *Department of Accounting, Finance and Economics, Griffith University*.
- Rahmi, N. A., & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Robbins, & Stephen, P. (2003). *Organization Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh)*. PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management &*

Economic Research.

- Sari, L. P. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dana Bos Pada SMA Kabupaten Pemalang.*
- Sawyer, P. S. (2006). *Sawyer's Internal Audit*. Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, W., Alfianto, N., & Kusumo, W. K. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan Pada Dinas Kota Semarang Wawan Setiawan Nasron Alfianto Willyanto Kartiko Kusumo. *Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 68–82.
<http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Sorunke, A., & Adekanmi, A. D. (2016). Corruption and Economic Transformation in Nigeria: An Agency Theoretic Perspective. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 6(2), 140–145.
- Sumbayak, J. S. (2017). Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Perusahaan Leasing di Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 3168–3182.
- Suprpta, E. L., & Pradnyawati, K. D. (2021). “Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Financial Pressure, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Lpd Di Kecamatan Tampaksiring Gianyar Erisyanita. *Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*.
- Tyagita, D. S. (2020). Influence of Leadership Style To Fraud (Case Study on Procurement of Goods in Pt Kaltim Industrial Estate). *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 8(1), 79–93.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). *Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (No. 31; Vol. 13, pp. 1–25).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (No. 32; pp. 1–177).
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30504/UU Nomor 32 Tahun 2004.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30504/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202004.pdf)
- Usman, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur). *BMC Public Health*, 5, 1–175.
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Utama, D. A., Sitawati, R., & Subchan. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Fraud, dengan Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening.*
- Wexley, K. N., & Yukl, G. (1977). *Organizational Behaviour and Personnel Psychology*.
- Widhiani, T. (2021). *TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan).*
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Paper Presented at the Symposium Nasional Akuntansi IX.*

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*.

Zulkarnain, R. M. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta). In *Accounting Analysis Journal*.

